

POLICE FORCE STRUCTURE ATAU KEMAMPUAN DAN KEKUATAN POLRI

(oleh Kol. Pol. Drs. Edward R. Pakasi)

Pendahuluan

Mengandung dua pengertian, pertama baik kemampuan maupun kekuatan merupakan makna yang sama atau timbal balik. Dikatakan memiliki kemampuan karena menunjukkan adanya kekuatan atau sebaliknya dikatakan mempunyai kekuatan karena menunjukkan kemampuan mengatasi tantangan. Kedua, dan menjadi pemahaman yang lebih tegas bahwa masing-masing mempunyai arti dan struktur sendiri-sendiri. Pengertian kedua ini memandang bahwa karena ada tantangan, maka perlu ada kemampuan untuk mengatasinya dan oleh karenanya harus mengoptimalkan kekuatan konkrit yang dimiliki. Pengertian kedua ini lebih memandang dari dalam tubuh organisasi, analog dengan anatomi tubuh manusia, sehingga dapat mengukur secara lebih matematis tentang kekuatan maupun kemampuan yang dimiliki. Dengan pengertian seperti ini, memudahkan dalam perencanaan kekuatan atau untuk mencapai kemampuan. (Force Planning)

Sedangkan pengertian yang pertama yang menyama-artikan secara timbal balik, cenderung abstrak seakan hanya kesan dari luar terhadap keberadaan suatu organisasi di tengah tantangan lingkungannya. Walaupun dengan adanya istilah "Force Struc-

ture" dan Force Planning" tercakup pengertian kedua-duanya, kekuatan maupun kemampuan dalam satu tarikan napas, karena tidak lazim digunakan istilah yang lain, namun liranua lebih baik apabila menggunakan pengertian yang tegas dan mudah dianalogkan dengan keberadaan diri manusia, serta mempermudah perencanaan organisasi maupun evaluasi guna perencanaan selanjutnya (Organizational Health Audit-OHA). Lebih jelas lagi apabila digunakan pengertian Postur yang mengandung aspek struktur kemampuan, aspek struktur kekuatan dan aspek gelar kekuatan. Bagi yang ingin menghindari penggunaan istilah Postur, kemudian ingin tetap menggunakan istilah "Force Struture" yang mengandung makna kekuatan dan kemampuan dalam satu tarikan napas, kiranya dengan suatu konsistensi adanya kandungan pengertian tiga aspek dimaksud, demi kepentingan kejelasan, kemudahan serta kelaziman universal, termasuk untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi sebagaimana dikemukakan tadi.

Dengan demikian berbicara tentang kemampuan dan kekuatan Polri (Police Force Structure), pertama dari aspek struktur kemampuan akan meliputi : kualitas kemampuan

profesional perorangan termasuk penguasaan peralatan dan sarana (equipment) yang kemudian menghasilkan perilaku dan kinerja perorangan, berikut kualitas kemampuan profesional fungsi-fungsi dalam organisasi Polri yang menghasilkan produk dan kinerja fungsional, kedua-duanya didasarkan pada struktur kemampuan atau lapis kemampuan yang standarisasinya dirumuskan di tingkat Staf Pimpinan Mabes Polri sebagai perumus kebijakan dan memiliki kewenangan supervisi. Kemudian kedua, aspek struktur kekuatan akan meliputi : pengorganisasian kekuatan secara fungsional ditingkat Mabes Polri dan secara kewilayahan sampai dengan struktur terkecil Pos Polisi beserta dengan fungsi-fungsi yang terdapat didalam struktur organisasinya, sesuai tugas pokok tiap struktur yang dirumuskan standarisasinya, atau secara stereotip oleh Staf Pimpinan Mabes Polri berdasarkan obyek tantangan tugas Polri secara umum. Selain itu adalah pengorganisasian secara baku untuk manajemen proyek dan satuan tugas (task force). Ketiga, aspek gelar kekuatan yang meliputi kuantitas kekuatan personel baik di satuan fungsi tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan beserta dengan satuan atau unit fungsi di kewilayahan tersebut yang standarisasinya ditentukan di Mabes Polri (DSPP), kemudian kuantitas dan bentuk ikatan satuan yang dikerahkan untuk menghadapi tantangan tugas tertentu. Baik kuantitas perorangan minimal dua personel di

tiap jenis tugas terkecil ataupun titik rawan (check point), atau kuantitas berupa Tim dan Satuan Tugas (Satgas/ task force), maupun kuantitas satuan yang dikerahkan atau "back-up" menghadapi gangguan kamtibmas berintensitas tinggi dan memerlukan bentuk satuan seperti militer/semi militer dalam ikatan Regu dampai dengan Brigade/Resimen, oleh kekuatan pemukul (striking Force) yaitu Brigade Mobil dan atau "Riot Police" (Polisi Penindak Huru-hara). Kesemuanya ini termasuk penggelaran "equipment" yang mendukung selain personel itu sendiri, jadi meliputi juga materil, fasilitas dan anggaran yang menyertai penggelaran personel.

Kaitan Dengan Perencanaan

Kaitan dengan perencanaan tentang kemampuan dan kekuatan, yang sesuai kelaziman universal digunakan istilah "force-planning" adalah juga meliputi tiga aspek yaitu pembinaan kekuatan, pembangunan kekuatan untuk mengawasi tantangan atau ancaman. Bagi Polri mungkin lebih tepat untuk menggunakan istilah tantangan yaitu segenap permasalahan intern keamanan dalam negeri (Kamdagri) termasuk permasalahan intern organisasinya, yang harus diatasi okeh organisasi Polri ini sehingga dirumuskan dalam Tugas Pokok. Karena ada pangangan universal sementara pihak atau boleh dikata menurut panganan beberapa negara besar dalam NATO ataupun Asia Pasifik, bahwa yang disebut ancaman adalah musuh dari luar negeri dan

menjadi tugas pokok militer. Tantangan itu yang dikatakan mencakup segenap permasalahan Kamdagri akibat perilaku menyimpang warga negara sendiri bukan musuh, juga akan meliputi segala aspek yang dapat digolongkan hambatan, kendala atau keterbatasan (constrains) dan gangguan yakni pelanggaran atas norma hukum (pidana). Demikian berarti hambatan dan keterbatasan itu dalam hal untuk melaksanakan penegakan hukum dan menciptakan Kantibmas, sedangkan gangguan adalah pelanggaran hukum itu sendiri, baik yang sudah nyata maupun yang "latent" (tersembunyi) atau potensial. Sebenarnya yang disebut terakhir itu "latent of pontensial crime" dapat juga disebut ancaman. Di kalangan bisnispun apabila menggunakan pendekatan SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) dalam menentukan cara-cara yang menguntungkan untuk mencapai tujuan bisnisnya (strategi) senantiasa mempertimbangkan aspek ancaman atau "threats" itu. Jadi, hambatan, kendala, gangguan dan ancaman adalah bagian dari tantangan yang harus diatasi, dan menjadi sasaran (obyek) dari pelaksanaan tugas pokok Polri.

Dengan demikian maka Pembangunan Kekuatan adalah upaya memperbaharui dan menambah, memperbesar kuantitas personel dan peralatan dari adanya kekurangan karena dilaksanakannya penggunaan kekuatan dan gelar kekuatan mengatasi tantangan tugas Polri, kemudian

Pembinaan Kekuatan adalah upaya memelihara dan meningkatkan kemampuan personel dan peralatan. Meliputi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan personel sudah ada, melalui kegiatan pendidikan ataupun latihan selagi bertugas (in service training) agar terpelihara "well trained personel" serta didukung pemenuhan kesejahteraan dan peralatan yang harus melengkapinya dalam hidup keseharian dan dalam tugas (well equipped) yang terjamin pemeliharaan serta perbaikannya. Setelah itu upaya Penggunaan Kekuatan sebagai fokus dari siklus yang disebut "emplant cycle" sejak Pembangunan Kekuatan dan Pembinaan Kekuatan sebagaimana diuraikan tadi, kemudian Penggunaan Kekuatan ini, yang adalah berwujud Gelar Kekuatan satuan-satuan Polri menghadapi tantangan tugas keseharian (daily challenges) dalam kegiatan rutin maupun dalam operasi Kepolisian. Operasi Kepolisian diselenggarakan sesuai Kalender Kantibmas-roundly years calendar activity-dan adanya target khusus ataupun kondisi kontijensi berskala besar, sehingga akan meliputi pula kegiatan latihan Pra Operasi Kepolisian dan mutasi personel atau pergeseran pasukan serta distribusi materiil pendukung tugas, disamping dukungan anggaran khusus untuk kepentingan Operasi Kepolisian. Singkatnya kekuatan digunakan, berkurang, dibangun kembali kemudian dirawat (pembinaan) untuk kemudian digunakan lagi. Seperti itulah siklus

dalam perencanaan kekuatan-force structure menghadapi tantangan tugas.

Titik Berat pada Profesionalisme.

Kiranya yang dianggap menonjol dari berbagai aspek tugas yang semuanya penting dalam uraian diatas adalah perwujudan profesionalisme personel perorangan dan profesionalisme satuan fungsi melalui lembaga pendidikan, serta sangat ditunjang oleh pembinaan mental dan jiwa nasionalisme, kesehatan serta tercukupinya peralatan (materil, fasilitas dan anggarannya), agar tidak sekedar sloganistis atau "lips service" belaka. Terutama dengan adanya keinginan segera terwujudnya Polri Mandiri, yang apabila ditinjau dari sudut pandang profesionalisme berintikan kembali ke jati diri Polisi, sebagaimana berlaku universal dan juga memang terdapat dalam budaya asli Indonesia sesuai doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja. Jati diri dimaksud, secara doktrin tersebut yang telah kita pahami bersama, baik oleh generasi Polri yang mengenyam pendidikan Polri sebelum diintegrasikan kurikulumnya dalam Sisdik ABRI, maupun generasi sesudahnya yang membaca pengertian doktrin dari banyak tulisan akhir-akhir ini, kurang lebih dapat pula diartikan : POLISI TUGAS SEPANJANG WAKTU MASYARAKAT DAPAT BEKERJA DAN BERISTRIRAHAT DENGANTENTERAM. Secarta personal bagi tiap insan Polri, jati diri yang tidak banyak diasuh atau

diinternalisasikan lagi semenjak berlakunya Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara No. 20/1982 bagi Polri, adalah jati diri tugas melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda perorangan dari pelanggaran hukum pihak lain (protecting life and properties) sebagaimana tercantum dalam rumusan tugas Polri diberbagai belahan dunia.

Ini merupakan salah satu jati diri tugas dan profesionalisme Polisi yang lebih bersifat "human security" yang menurut argumentasi beberapa pejabat Dephan lebih diperlukan dewasa ini, ketimbang "state security" seperti yang banyak diperankan TNI-AD pada masa Orde Baru. Titik berat "state security" simasa itu pula yang turut melunturkan jati diri dan profesionalisme Polri ditandai dengan eksisnya lembaga Kopkamtib dan pengambil alihan setidaknya eksis Laksus-laksus Pangkoptibda atau sejenisnya atas perkara pidana yang ditangani Polri. Juga dengan diterbitkannya petunjuk-petunjuk mengenai operasi dan Kegiatan Kamtibmas yang titik berat obyeknya adalah kewibawaan pemerintah (Orde Baru), bukannya langsung pada obyek keamanan (human security) dan ketertiban masyarakat (publik order) sebagaimana hakekatnya menurut Van Apeldoorn (keamanan, menyangkut kemanusiaan, rasa aman perorangan sedangkan Ketertiban menyangkut kehidupan bersama bersifat massal-society & community-wide Sumbayak, 1985). Distorsi jati diri baik secara doktrin (yang hilang sejak efektif berlakunya doktrin CADEK bagi Polri dalam

ABRI) maupun secara personal, berdampak pada tingkat kepedulian petugas Polisi, dalam arti legitimasi. Dan tinggal kepedulian atas masalah kemanusiaan ini. (human security) yang dapat membuat orang lain "salut" kepada petugas Polri, di tengah anggapan bahwa Polri tidak lain sebagai Pengusik dan Peninsas semata (vice Chaerudin Ismail, 1999). Termasuk salut bagi Polri atas keberhasilan menanggulangi narkoba dan kriminal lainnya, tidak lain itu adalah dalam rangka "human security" juga. Tingkat kepedulian untuk "protecting life and properties" yang terdistorsi akan nampak pada petugas yang membiarkan berlangsungnya serta berakibatnya pelanggaran hukum kepada perorangan, sepanjang tidak mengganggu atau meresahkan masyarakat banyak, baik yang terdeteksi dini apalagi yang tidak (dark number). Kasus Marsinah di Jawa Timur tahun 1994 adalah salah satu contoh. Bahwa kemudian akibat tindakan membiarkan secara diam-diam itu akhirnya menggemparkan juga, mungkin dianggap resiko semata, seakan perhitungan matematis di medan tempur.

Kiranya masalah-masalah seperti ini yang dapat dipertimbangkan dalam perubahan kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan Polri, setidaknya perubahan sikap dan perilaku serta Persiapan Mengajar (PM) pada tenaga pendidik (Gadik) dan instruksi bagi petugas lapangan sekarang ini jika seandainya untuk kegiatan merubah kurikulum, Bahan Ajaran (Hanjar) atau

Buku-buku petunjuk jelas harus memerlukan waktu lama. Persiapan mengajar yang didiskusikan terlebih dahulu dan fasilitas mengajar yang cukup bagi Gadik agar tidak lebih besar pasak dari pada tiang sepertinya merupakan contoh sepele, namun berdasarkan pengalaman, merupakan stimulasi yang baik agar instruksi dapat memberikan teladan dan perilaku normatif menuju kembali ke jati diri dan peningkatan profesionalisme dalam rangka Polri Mandiri. Konsekuensinya adalah merupakan keniscayaan untuk memprogramkan secara "bottom up" kegiatan-kegiatan semacamnya (programming) dan diaspirasikan dalam satu bahasa oleh lembaga-lembaga pendidikan Polri sebagai pembentuk sikap mental dan perilaku, sehingga menjadi kebijakan institusional serta terdukung anggaran (budgeting) secara "top down" karena masih dalam kondisi serba keterbatasan. Konsepsi lain yang kira-kira masih lebih jauh lagi adalah penetapan Tunjangan Jabatan bagi personel yang memiliki keahlian seperti halnya Gadik ini. Secara seragam tunjangan gadik didasarkan pada epangkatan, namun dengan bertambahnya pengalaman mengajar, keikut sertaannya dalam seminar dan melaporkan Resume seminar serta adanya secara bervariasi, yang standarnya ditentukan oleh Staf Pimpinan Mabes Polri.

Uraian di atas kesemuanya adalah dalam rangka konkritisasi profesionalisme Polri, untuk menunjukkan kepada masyarakat yang

kian menunggu dan menunggu tentang apa yang berubah di Polri ini, yang tentu saja bukan pada baju dinasny semata, kalau dikatakan mau Mandiri. Yang diharapkan adalah perubahan budaya (nilai, sikap dan perilaku) dan tiada lain adalah melalui pranata-pranata pendidikan Polri (Prae service and inservice training). Karena sudah dinanti-nanti maka "action plan" dapat juga menjangkau petugas lapangan selagi dalam tugas, tanpa harus menunggu pada "out put" lembaga pendidikan sebagai satu-satunya tumpuan harapan. Petugas lapangan sekarang ini dapat digilir untuk mengikuti pekan pembekalan oleh para tim gadik SPN dan instruktur inti tiap Polres yang telah ditatar terlebih dahulu secara terpusat dan atau rayonisasi.

Mengutip Dr. Satjipto Rahardjo, bahwa :

Peralihan Polri dari ABRI harus kita pakai sebagai momentum dimana citra Polisi itu menjadi baik berarti kita harus menjalankan langkah-langkah itu tercapai dalam waktu dekat ... sebulan atau dua bulan mereka didril tampil secara beda. Tiap hari didril dalam kepala mereka untuk menjadi polisi sipil yang tujuannya tidak lain adalah melindungi rakyat, peduli kepada keadaan rakyat. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang lebih mendasar ... sehingga masyarakat tahu ada sesuatu yang berubah pada Polri. Bahwa Polisi kini menjadi lebih memperhatikan masyarakat dalam arti ingin melindungi masyarakat atau CARING. Motto ini hendaknya dijabarkan dalam

reedukasi dalam bentuk perilaku-perilaku yang konkret (Media Indonesia 4 April 1999).

Kesimpulan

Demikian opini tentang kemampuan kekuatan Polri dan penggunaan, pembangunan serta pembinaannya dalam satu siklus yang disebut "employment cycle" berfokus pada penggunaan kekuatan (latihan, operasi dan kerjasama Internasional) dengan mengandalkan jati diri dan profesionalisme. Kiranya pada jati diri dan profesionalisme yang peduli rakyat dan melindungi nilai kemanusiaan atau "caring" inilah (bahasa Sansekerta : PRAJAGHUPTA) letak kekuatan sesungguhnya atau keunggulan komparatif Polri sekarang ini. Dan itu seyogyanya dicapai dan dirubah melalui pranata pendidikan, di samping yang harus dicapai dalam jangka lama, namun ada yang dapat dilaksanakan dengan langkah cepat dalam "action plan" yang diprogramkan di tiap KOD, selain yang di Lemdik-Lemdik Polri sehingga nampak nyata perubahan kultur atau tampil bedanya Polri Mandiri.

Semoga.